

## Analisis Pendapatan dan Pembiayaan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah

Inggit Hascaryani<sup>1</sup>, M. Nurudin<sup>2</sup>, Giyoto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

\*e-mail: [inggithascaryani@gmail.com](mailto:inggithascaryani@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to compare the amount, source of income, and expenditure allocation in the school budget plan (RKAS) in the last three years, namely 2018, 2019 and 2020. This study uses the content analysis method. The data sources came from the 2018, 2019 and 2020 RKAS documents. Data analysis used quantitative with percentages and descriptive qualitative. The results show that the amount of revenue in 2018 is higher than 2019 and 2020 is higher than 2018. Source of revenue for 2018 comes from central and regional BOS, while in 2019 and 2020 only central BOS. The expenditure allocation in 2018 was the highest in financing standards, in 2019 the highest was in management standards and in 2020 the highest was in financing standards.

**Keywords :** Plan, Budget, School

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan jumlah, sumber pendapatan, dan alokasi pengeluaran dalam rencana anggaran sekolah (RKAS) dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Sumber data berasal dari dokumen RKAS 2018, 2019 dan 2020. Analisis data menggunakan kuantitatif dengan persentase dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pendapatan pada tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2019 dan tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2018. Sumber pendapatan untuk tahun 2018 berasal dari BOS pusat dan daerah, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 hanya BOS pusat. Alokasi belanja pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam standar pembiayaan, pada tahun 2019 tertinggi adalah pada standar pengelolaan dan pada tahun 2020 tertinggi adalah pada standar pembiayaan.

**Kata kunci :** Rencana, Anggaran, Sekolah

Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

### PENDAHULUAN

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dalam sebuah sekolah yaitu pembiayaan pendidikan (RUSTIAWAN, 2021). Pembiayaan pendidikan adalah suatu analisis tentang sumber-sumber (*revenue*) dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukkan bagi pengelolaan pendidikan secara efisien untuk mencapai tujuan (Kurniady et al., 2018; Suryana, 2020). Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (*instrument input*) yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Lorensius & Ping, 2021; Widjaja, 2021). Tanggung jawab dalam Pembiayaan pendidikan tidak hanya dibebankan pada Pemerintah, dan Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat. Pembiayaan pendidikan juga memiliki beberapa komponen penting yaitu

biaya langsung dan tidak langsung (Indryati & Setyawan, 2020; Putri, 2019; Sukmawati, 2022).

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi maka yang berkualitas hanya ada dalam angan-angan. Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (instrument input) yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Ida Nurlaya, 2020; Solehan, 2022).

Dalam pelaksanaannya pembiayaan pendidikan telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. Hal ini untuk memperjelas tentang Pendidikan gratis dan bermutu yang dicanangkan oleh pemerintah, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalah pahaman. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. Sejak Juli 2005 Pemerintah menyelenggarakan suatu Program yang dinamai Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Badriyatul Fitri et al., 2021; Lukman et al., 2021; Syukri et al., 2020).

Pendanaan BOS berdasarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Pendidikan Agama berasal dari relokasi dana subsidi BBM di bidang Pendidikan (Widodo, 2021). Menurut “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Ansyari, 2021; Armaiyeti et al., 2020).

Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan (Akdon, 2019). Dalam

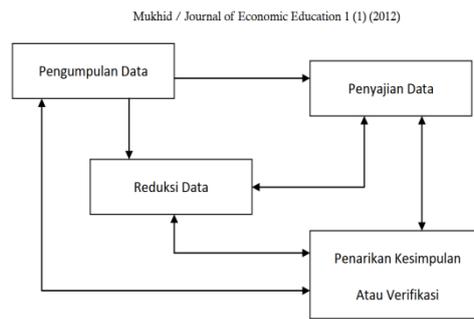
menetapkan pembiayaan program sekolah didorong untuk menganggarkan berdasarkan 8 standar Pendidikan. Delapan standar Pendidikan yaitu; standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan.

Pembiayaan Pendidikan pada suatu sekolah dapat dilihat dari dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah dibuat sekolah setiap tahunnya. Sesuai Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler Pasal 1 ayat 15, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat (bagi sekolah negeri), atau penyelenggara pendidikan/yayasan (bagi sekolah swasta). Masa RKAS hanya berlaku untuk satu tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja (pengeluaran). Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budgeting). Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan penjabaran pembiayaan dari program kerja sekolah. Pembiayaan yang direncanakan, baik penerimaan maupun penggunaannya selama satu tahun (Mesiono et al., 2021).

Dalam konferensi pada tanggal 10 Februari 2020 Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendikbud) menjelaskan bahwa pada tahun 2020, dana BOS dalam APBN dialokasikan sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Angka Rp 54,32 triliun tersebut meningkat sebesar 6,03% dibanding tahun 2019. Untuk tahun ini, 2020, SD naik unit costnya dari Rp 800 ribu menjadi Rp 900 ribu. Untuk SMP, dari 1 juta menjadi Rp 1.100.000. Untuk SMA naik dari Rp 1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. SMK akan tetap sama karena tahun lalu telah dinaikkan dari Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,6 juta dan untuk Pendidikan Khusus akan tetap sama Rp 2 juta persiswa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif sedangkan data kualitatif dianalisis dengan diskriptif. menggunakan rangkaian kalimat-kalimat yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema (Fadli, 2021; Sugiyono, 2019). Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses pembiayaan di SMP Negeri 1 Ceper. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020. Objek penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Ceper yang berlokasi di Kabupaten Klaten. Jenis data penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berbentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subyek. Karakteristik data primer berbentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia. Subyek yaitu kepala sekolah dan bendahara BOS. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder yang digunakan dari dokumen RKAS tahun 2018, 2019 dan 2020. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara penulis gunakan dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat perolehan data dari responden. Teknik wawancara digunakan untuk mewancarai sejumlah *key informan* yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian, yaitu kepala sekolah dan bendahara BOS. Penelitian ini menggunakan teknik ketekunan pengamatan di lapangan dan triangulasi (Sugiyono, 2018). Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dengan berbagai sumber yaitu observasi/pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh juga tepat. Proses analisis data merupakan suatu proses dalam rangka mencari dan Menyusun secara sistematis data dalam suatu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahab-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Prof.Dr.Sugiyono, 2017). Hasil dan Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Adapun prosedur analisis data yang penulis tempuh dalam penelitian ini meliputi (1) pengumpulan data (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi yang digambarkan pada alur gambar 1.

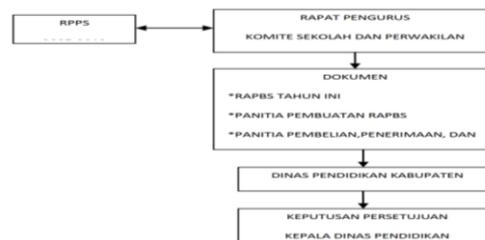


**Gambar 1.** Langkah-langkah Analisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Kedua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut: Penyusunan anggaran pembiayaan berbasis sekolah atau sering disebut anggaran belanja sekolah (ABS).

Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu. Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian dan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis sebagai alat penafsir, alat kewenangan dan alat efisiensi.



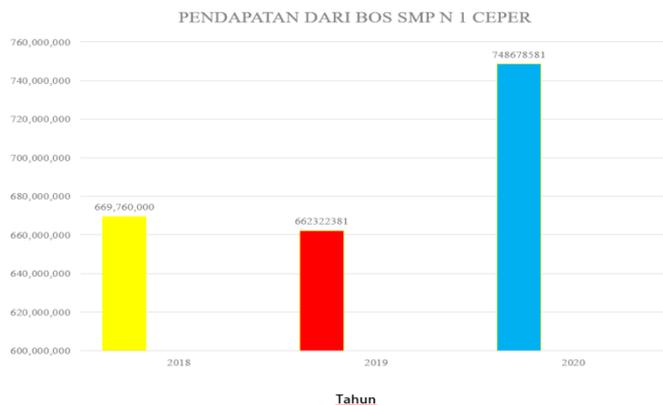
**Gambar 2.** Proses Pembiayaan Pendidikan SMP Negeri 1 Ceper

Sumber : DD KS; D.Dok

Proses penyusunan anggaran biaya pendidikan di SMP Negeri Ceper merujuk kepada dokumen rencana kegiatan anggaran sekolah ( RKAS ) SMP Negeri 1 Ceper Tahun 2018, 2019, dan 2020. Dari hasil telaah dokumen dan wawancara yang penulis lakukan di SMP Negeri 1 Ceper proses penganggaran pendidikan dapat diringkaskan dalam Gambar 2.

Aspek pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 1 Ceper terkait dengan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang memuat komponen-komponen: (1) Ketercapaian tujuan institusional SMP; (2) Organisasi dan manajemen sekolah; (3) Pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Kegiatan belajar mengajar; (5) Lingkungan Sekolah; (6) Pengembangan sarana prasarana pendidikan; dan (7) Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat.

Sumber biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Ceper berasal dari anggaran pemerintah, yaitu dari APBN dan APBD Kabupaten. Dalam Pembiayaan SMP Negeri 1 Ceper dihadapkan pada terbatasnya dana yang tersedia, tetapi kebutuhan cenderung meningkat dan tidak terbatas (Dok. KS). Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan persoalan keuangan di atas SMP Negeri 1 Ceper berupaya mengelola keuangan secara lebih baik dan efisien. Pengalokasian biaya lebih ditekankan pada skala prioritas. Yang paling mendesak untuk segera dipenuhi menjadi prioritas dalam penganggaran, begitu pula hal yang dianggap penting dan membutuhkan anggaran besar maka akan dianggarkan lebih besar. Naik turunnya anggaran disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan sekolah. Ini sesuai penelitian Susilawaty , Cut Zahri Harun dan , Khairuddin tahun 2012 yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh bahwa Rencana pembiayaan di SD Negeri 4 Banda Aceh meliputi penganggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalan sumber dana pendidikan, dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Penyusunan perencanaan pembiayaan tersebut didasarkan atas susunan prioritas yang sangat mendesak dan lebih diutamakan dalam setiap tahun anggarannya.



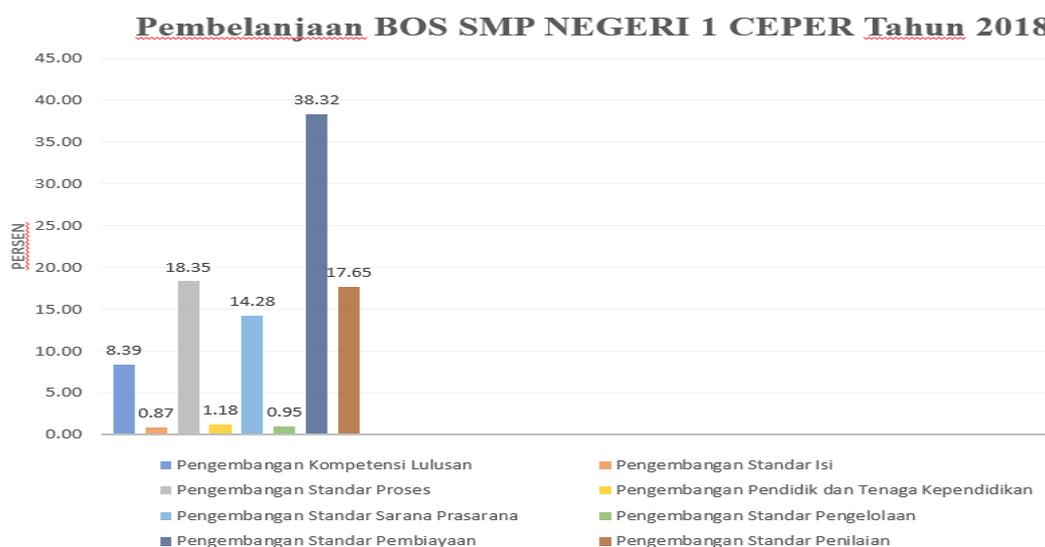
**Gambar 3.** Gafik 1

Sumber : DD KS; D.Dok

Berdasarkan grafik 1. tersebut dapat dilihat bahwa sumber pembiayaan selama 3 tahun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,11 % jika dibandingkan pada tahun 2018 hal ini dikarenakan pada tahun 2019 sumber pendapatan hanya dari BOS pusat sedangkan pada tahun 2018 masih mendapatkan BOS daerah dari pemerintah kabupaten. Dari data RKAS tahun 2018 sumber pembiayaan berasal dari BOS pusat dan BOS daerah, BOS pusat sebesar 96 % dan 4 % dari BOS pendamping APBD II. Sedangkan di tahun 2019 dan 2020 BOS hanya berasal dari BOS pusat. Sumber pendapatan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 13 % diakibatkan karena jumlah BOS setiap anak per tahun meningkat sebesar 10 % dari Rp. 1.000.000.00 menjadi Rp. 1.100.000 selain itu karena jumlah siswa pada tahun 2020 meningkat sebesar 2 % dari tahun 2019.

Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 tahun 2018 secara rinci dapat di lihat pada grafik 2. Mata anggaran pembelanjaan BOS digunakan untuk membiayai delapan standar Pendidikan yaitu; 1) standar pengembangan kopetensi lulusan dengan prosentase sebesar 8,39 % 2) pengembangan standar proses dengan prosentase sebesar 18,35 % 3) pengembangan standar sarana prasarana dengan prosentase sebesar 14,28 %; 4) pengembangan standar pembiayaan dengan prosentase sebesar 38,82 %; 5) pengembangan standar isi dengan prosentase sebesar 0,87 %; 6) pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan prosentase sebesar 1,18 %; 7) pengembangan standar pengelolaan dengan prosentase sebesar 0,95 %; 8) pengembangan standar penilaian dengan prosentase sebesar 17,65 %. Dari kedelapan standar tersebut alokasi pembiayaan yang paling besar digunakan pada pengembangan standar pembiayaan dan yang paling rendah pada pengembangan standar pengelolaan.

Pengembangan standar pembiayaan dianggarkan paling besar karena merupakan prioritas dalam rangka untuk membiayai komponen-komponen langgan daya dan jasa dan pembiayaan honorarium pegawai honorer. Sedangkan standar pengelolaan dalam penganggaran memperoleh persentase yang paling rendah karena beberapa komponen telah ada dan dianggarkan tahun sebelumnya. Untuk itu pada tahun 2018 tidak dianggarkan dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran. Hal ini sesuai dari tujuan manajemen yang diterapkan dalam manajemen pembiayaan, bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan (Richard L. Daft, 2015). Hal ini juga sesuai dengan Permendikbud No 8 tahun 2020 tentang juknis BOS regular pada pasal 3 bahwa penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabilitas dan transparasi.

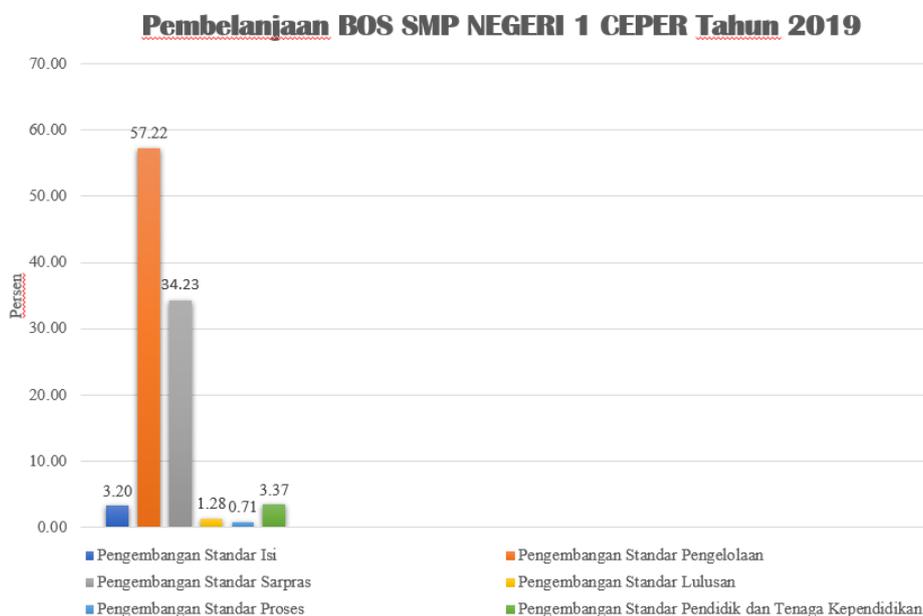


**Gambar 4.** Grafik 2  
Sumber : DD KS; D.Dok

Berdasarkan grafik 3, penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 tahun 2019 secara rinci dapat di lihat pada grafik 3, mata anggaran pembelanjaan dana BOS digunakan hanya untuk membiayai 6 standar Pendidikan yaitu; 1) pengembangan standar isi dengan prosentase sebesar 3,20 %; 2) standar sarana dan prsarana dengan prosentase sebesar 57,22 % ; 3) pengembangan standar proses dengan prosentase sebesar 0,71 % ; 4) pengembangan standar pengelolaan dengan prosentase sebesar 34,23 % ; 5) pengembangan standar lulusan dengan prosentase sebesar 1,28 % ; 6) pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp 3,37 %; 7) pengembangan standar

pembiayaan dengan prosentase sebesar 0 % ; 8) pengembangan standar penilaian dengan prosentase sebesar 0 % . Dari hasil wawancara dengan bendahara BOS SMP Negeri 1 Ceper pengembangan standar pembiayaan dan standar penilaian masih 0 % karena sistem aplikasi BOS yang belum terpetakan dalam 2 standar pembiayaan dan standar penilaian padahal ada komponen yang masuk dalam dua standar tersebut tapi di sistem aplikasi BOS yang masih baru yang diluncurkan di tahun 2019 maka terdapat kesalahan dalam memasukkan komponen dalam standar-standar pengembangan pendidikan sehingga ada 2 standar yang belum dimasukkan yaitu standar pembiayaan dan penilaian. Dari kedelapan standar tersebut alokasi pembiayaan yang paling besar digunakan pada pengembangan standar pengelolaan dan alokasi pembiayaan yang paling rendah pada pengembangan standar proses.

Pada tahun 2018 anggaran difokuskan pada pengembangan pembiayaan pendidikan sedangkan pada tahun 2019 anggaran difokuskan pada pengembangan standar pengelolaan karena dianggarkan paling besar. Pengembangan standar pengelolaan dianggarkan paling tinggi dalam upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan manajemen sekolah untuk mencapai mutu sekolah.

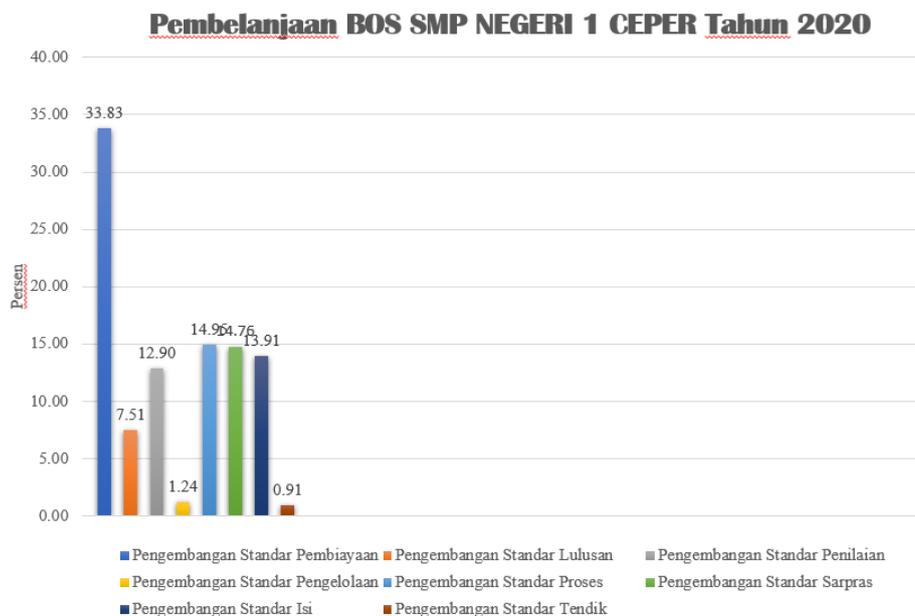


**Gambar 5. Grafik 3**  
Sumber : DD KS; D.Dok

Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 tahun 2020 secara rinci dapat di lihat pada grafik 4, mata anggaran pembelanaan BOS digunakan untuk membiayai delapan

standar Pendidikan yaitu; 1) pengembangan standar pembiayaan dengan prosentase sebesar 33,83 % ; 2) pengembangan standar pengelolaan dengan prosentase sebesar 1,24 % ; 3) pengembangan standar isi sebesar 13,91 %; 4) pengembangan standar lulusan sebesar Rp. 7,51 % ; 5) pengembangan standar proses dengan prosentase sebesar 14,95 %; 6) pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan prosentase sebesar 0,91 % ; 7) pengembangan standar penilaian dengan prosentase sebesar 12,90 % ; 8) pengembangan standar sarana dan prasarana dengan prosentase sebesar 14,96 % . Dari kedelapan standar tersebut alokasi pembiayaan yang paling besar digunakan pada pengembangan standar pembiayaan dan alokasi pembiayaan yang paling rendah pada pengembangan standar pengelolaan.

Berdasarkan grafik 4. penggunaan anggaran tertinggi pada tahun 2020 untuk pengembangan standar pembiayaan dikarenakan merupakan prioritas program SMPN 1 Ceper dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah. Alokasi anggaran paling rendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Prioritas anggaran diperlukan dalam rangka optimalisasi manajemen pembiayaan. Sedangkan pada standar proses dalam penganggaran memperoleh prosentase yang paling rendah. Prosentase anggaran ada yang paling tinggi dan paling rendah dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.



**Gambar 6.** Grafik 4  
Sumber : DD KS; D.Dok

Menentukan biaya pendidikan di sekolah perlu dianalisis biaya total (*total cost*) dan biaya satuan siswa (*unit cost*). Biaya total, disebut juga biaya satuan sekolah, merupakan kumpulan biaya yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun pelajaran. Biaya satuan siswa merupakan ukuran yang menggambarkan besaran uang yang dialokasikan sekolah untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Dengan menganalisis biaya satuan itu dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya di setiap sekolah, manfaat dari investasi pendidikan, dan pengeluaran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif (Indryati & Setyawan, 2020). Untuk menentukan biaya satuan (*unit cost*) dapat diperoleh dari hasil bagi dari jumlah seluruh pengeluaran biaya operasional selama satu tahun dibagi jumlah seluruh siswa. Melihat anggaran di tahun 2018 menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Ceper lebih memperhatikan kepentingan siswa. Terjadinya penurunan dan kenaikan di pada beberapa komponen anggaran pada tahun 2019 dan 2020 karena disesuaikan dengan prioritas dalam penganggaran dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan terhadap siswa hal ini lebih disebabkan adanya kebutuhan kebutuhan yang sudah dapat dipenuhi di tahun-tahun sebelumnya,

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hani Latifah tahun 2017 berjudul Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran bahwa Penggunaan dana BOS tidak boleh keluar dari juknis yang telah ditetapkan. Kepala sekolah harus pandai membagi keuangan kepada komponen-komponen pemenuhan SNP yang telah ditetapkan. Delapan SNP memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, bagian yang termasuk pada komponen proses pembelajaran adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

## SIMPULAN

Sumber pendapatan SMP Negeri 1 Ceper pada tahun 2018 berasal dari BOS Pusat sebesar 96 % dan BOS pemda tingkat II atau kabupaten sebesar 4 % sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 100 % berasal dari BOS pusat saja. Besaran dana BOS dari tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,11 % di tahun 2019 karena dana BOS yang diperoleh hanya dari BOS pusat sedangkan dan BOS dari daerah pemda kabupaten sudah tidak ada, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan pendapatan sebesar 13 % karena besar anggaran dana BOS per siswa meningkat. Penggunaan dana BOS di tahun 2018, 2019 dan 2020 terdapat perbedaan alokasi prosentase setiap standar nasional Pendidikan hal ini disesuaikan dengan prioritas kebutuhan sekolah tiap tahunnya dan sesuai prinsip efektifitas dalam penggunaan dana BOS. Dalam proses perencanaan anggaran 2018, 2019 dan 2020 terdapat perbedaan apabila dilihat dari delapan standar Pendidikan, pada tahun 2018 delapan standar Pendidikan dianggarkan dengan anggaran tertinggi pada pengembangan standar pembiayaan dan paling rendah pada standar pengelolaan. Anggaran BOS tahun 2019 dari 8 standar Pendidikan pada data laporan hanya 6 standar pendidikan karena aplikasi pelaporan yang belum sempurna padahal seharusnya 8 anggaran telah ada tetapi belum dimasukkan ke semua 8 standar. Anggaran yang tertinggi pada pengembangan standar pengelolaan dan yang paling rendah standar proses. Pada anggaran BOS tahun 2020 semua standar pendidikan dianggarkan, anggaran tertinggi pada pengembangan standar pembiayaan dan yang paling rendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Terjadinya penurunan dan kenaikan di pada beberapa komponen anggaran pada tahun 2019 dan 2020 karena disesuaikan dengan prioritas dalam penganggaran dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan terhadap siswa hal ini lebih disebabkan adanya kebutuhan kebutuhan yang sudah dapat dipenuhi di tahun-tahun sebelumnya,

## DAFTAR RUJUKAN

- Akdon. (2019). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ansyari, R. R. (2021). PROFESI GURU DAN PERAN PADA PENDIDIKAN. In *Seri Publikasi Pembelajaran* (Vol. 1, Issue 2).
- Armaiyyetti, R., Marsidin, S., & Alkadri, H. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kelapa Sekolah dan Dana Bos terhadap Prestasi Guru. *Jurnal Basicedu*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i2.380>

- Badriyatul Fitri, U. N., Latief, M. F. N. J., Bukhori, I., & Hidayat, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Koperasi Pondok Pesantren. *TADBIR MUWAHHID*, 5(1). <https://doi.org/10.30997/jtm.v5i1.3812>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ida Nurlaya, L. (2020). PENGARUH MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN FASILITAS PEMBELAJARAN TERHADAP MUTU SEKOLAH. *Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.51729/525>
- Indryati, R., & Setyawan, S. (2020). Faktor-faktor Penentu Dalam Mengambil Keputusan Memilih Perguruan Tinggi Swasta Politeknik Bumi Akpelni Semarang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(2).
- Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2018). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP MUTU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3). <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9620>
- Lorensius, & Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 1(2).
- Lukman, L., Akhmad, A., & Khairat, U. (2021). SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA MTs DDI MALUNDA. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 3(2). <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2404>
- Mesiono, M., Siregar, M. F. S., & Saputra, I. B. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(02).
- Prof.Dr.Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif , kualitatif dan r & d*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, I. A. (2019). Implementasi Sukuk Negara dan dampaknya terhadap pembangunan negara di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Richard L. Daft. (2015). Era baru manajemen. In *Era baru manajemen*. Jakarta: Devita.
- RUSTIAWAN, H. (2021). KOMERSIALISASI PENDIDIKAN (Analisis Pembiayaan Pendidikan). *TAZKIYA: Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(1).
- Solehan, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu

- Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1).  
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sukmawati, E. N. (2022). PEMBELAJARAN DARING BERBASIS MASALAH DALAM PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR. *Juli*, 2(2), 196–199.  
<https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jurdikbud/article/view/299>
- Suryana, S. (2020). PERMASALAHAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PENDIDIKAN. *Edukasi*, 14(1).  
<https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Syukri, M., Sitompul, I., & Banurea, O. K. (2020). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Widjaja, W. (2021). Analisis Kinerja Karyawan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya: Studi Kasus di PT X. *Jurnal Perspektif*, 19(1).  
<https://doi.org/10.31294/jp.v19i1.9527>
- Widodo, A. P. (2021). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2). <https://doi.org/10.21831/socia.v17i2.32478>